

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Perkembangan nuklir Korea Utara pada awalnya dimulai ketika perang Smenanjung Korea, yaitu antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1950-1953. Pada awalnya Korea Utara hanya ingin memproduksi bahan nuklir melalui bijih uranium hanya untuk energy, tetapi hal tersebut berubah ketika Korea Utara mengekstrak bahan tersebut menjadi senjata nuklir. Akhirnya pada tahun 2003 dibentuklah sebuah instrumen diplomasi yang bertujuan untuk meredam pengembangan nuklir Korea Utara. Instrumen ini disebut *Six Party Talks*, yang mana didalamnya beranggotakan oleh 6 negara *Six Party Talks* yang salah satunya adalah Tiongkok.

Tiongkok ditunjuk sebagai ketua perundingan dalam karena Tiongkok dinilai mempunyai kedekatan dengan Korea Utara. Dengan pertimbangan tersebut Tiongkok diharapkan menjadi negara yang berpengaruh untuk merubah kebijakan Korea Utara dalam pengembangan nuklirnya. Hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara sudah berlangsung sejak lama. Yaitu pada masa perang Korea, Tiongkok membantu Korea dengan bantuan moral dan material kepada Kim il Sung yang menjadi pemimpin Korea pada saat itu. Isu nuklir pada saat ini menjadi salah satu isu yang dibicarakan oleh Tiongkok.

Presiden Xi Jinping mulai menjadi pemimpin Tiongkok pada awal tahun 2013, yang mana ketika itu Xi Jinping telah terfokus kepada nuklir Korea Utara, Xi Jinping melakukan pergerakan dengan terfokus kepada denuklirisasi Korea Utara. Hal tersebut ditandai dengan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang disetujui oleh Xi Jinping, salah satunya pada tahun 2013 yaitu resolusi Dewan Keamanan PBB 2087 yang berisi mengecam peluncuran satelit Korea Utara dan mengingatkan kepada sanksi sebelumnya yang diberlakukan terhadap program pengembangan senjata nuklir tersebut. Hal ini mendesak kepada kepatuhan resolusi dan berjanji untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut terkait kerjasama ataupun kegiatan pengembangan nuklir.

Masih ada beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang disetujui oleh Xi Jinping, yaitu 2094, 2270, dan 2321. Perubahan sikap Tiongkok tersebut, yang mana sebelum pemerintahan Xi, tidak ada langkah konkret ataupun tegas terhadap nuklir Korea Utara, ketika pada masa pemerintahan Xi Jinping, Xi bertindak keras, hal ini untuk meyakinkan bahwa Tiongkok memang benar ingin mencapai tujuan, yaitu denuklirisasi Korea Utara.

Posisi strategis Tiongkok terhadap Korea Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor geografis, faktor ideologis dan faktor hubungan sejarah antara Tiongkok dan Korea Utara. Dari segi geografis memang Tiongkok berbatasan langsung dengan dibatasi oleh dua sungai yaitu *Yalu River* dan *Tuman River*, sehingga memang hal tersebut membuat Tiongkok terkena dampak dari panasnya situasi di Korea Utara disamping Tiongkok itu sendiri menjadi Negara berpengaruh di kawasan tersebut. Dari segi ideologis Tiongkok dan Korea Utara pada awalnya menganut system komunis, yang mana Tiongkok memang berawak dari keinginan Negara sendiri dengan menyatukan kamu *borjuis* dan *proletar* pada awal kemerdekaannya, sedangkan Korea Utara pada awalnya dipengaruhi oleh Uni Soviet yang mana pada prinsipnya adalah sama. Kedekatan geografis antar kedua Negara membuat Korea Utara dan Tiongkok berbagi sejarah ideology yang sama. Oleh karena itu sangat kecil jarak antar kedua Negara membuat Korea Utara dan Tiongkok saling mempengaruhi

Lalu faktor historis dari Tiongkok dan Korea Utara dimana, Tiongkok dan Korea Utara memiliki hubungan semenjak awal kerajaan dan masa Mao, singkatnya mulai terlihat semenjak perang semenanjung Korea, yang mana Tiongkok memberikan bantuan moril serta materil kepada Korea Utara. Pada 1961 hubungan kedua Negara semakin erat yang mana ditandai dengan disahkannya perjanjian antara kedua Negara dalam bidang ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan. Dalam sejarahnya banyak tensi naik turun antara hubungan kedua Negara, yang terlihat adalah dalam bidang politik yang mana Tiongkok menggunakan politiknya dengan mendekati diri ke Korea Selatan dalam hal kerjasama bilateral yang mana membuat Korea Utara geram dan merenggangkan hubungan dengan Tiongkok. Hal tersebut dilakukan agar Korea Utara dapat berkerjasama dengan damai terhadap Korea Selatan dan Tiongkok.

Kembali kepada era Xi Jinping terhadap denuklirisasi Korea Utara, Xi Jinping ketika menjabar menjadi pemimpin Korea Utara mempunyai beberapa kebijakan atau diplomasi yang diterapkan untuk tujuan denuklirisasi Korea utara. Hal tersebut mengacu kepada 3 hal dasar yang mempengaruhi kebijakan Xi, yaitu adalah *Denuclearization of The Korean Peninsula, Peace and stability on the Korean Peninsula dan Promoting China-North Korea economic relation*. Langkah yang diambil Xi Jinping pada masa pemerintahannya cukup tegas yaitu dengan mengarahkan kebijakannya kepada *Denuclearization First* yaitu sebuah langkah kebijakan Xi untuk fokus kepada denuklirisasi. Kebijakan tersebut diterapkan kepada salah satu agenda Xi dalam pertemuan KTT dengan Negara-negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, yang mana agenda tersebut diketahui dilaksanakan pada tahun 2013-2015.

Lalu diplomasi Xi terhadap Korea Utara yang selanjutnya adalah *engagement economic*, hal ini menjadi salah satu diplomasi Xi, karena Xi menganggap bahwa dia tidak bisa mengabaikan hubungan antara Tiongkok dengan Korea Utara disamping fokus kepada denuklirisasi. Tiongkok berpendapat bahwa Korea Utara harus masuk kedalam lingkup ekonomi agar dapat meredam perkembangan nuklir Korea Utara. Menurut ahli politik LIPI, hubungan ekonomi Tiongkok dan Korea Utara menjadikan Korea Utara ketergantungan terhadap Korea utara sehingga Korea Utara dapat berhati-hati dalam bertindak. Yang selanjutnya adalah *Sanction*. Sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB pada era Xi disetujui Oleh Xi Jinping, karena Xi menyadari bahwa Tiongkok mempunyai dua tugas yaitu denuklirisasi dan memgang kepercayaan dunia internasional, dengan langkah Tiongkok menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut maka Tiongkok membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tiongkok memang ingin denuklirisasi Korea Utara.

Tiongkok selaku Negara yang dipercaya dapat meredam 'kebuasan' Korea Utara terkait nuklir selalu mencoba untuk menciptakan denuklirisasi di Korea Utara. Diplomasi yang dilakukan Tiongkok melalui ekonomi dengan maksud menciptakan situasi ketergantungan atau interdependensi masih kurang efektif yang dibuktikan masih berkembangannya nuklir Korea Utara sampai 2016. Pada akhirnya Tiongkok merasa perlu bertindak tegas terhadap Korea Utara dengan

cara memberikan beberapa sanksi dari Tiongkok itu sendiri ataupun mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB. Ada alasan dibalik kenapa Tiongkok ingin sekali mendenuklirisasi Korea Utara dan tetap menjaga hubungan adalah, Tiongkok ingin menunjukkan bahwan Tiongkok dibawah kepemimpinan Xi Jinping dapat menciptakan kedamaian di kawasan serta membuktikan bahwa Tiongkok merupakan Negara besar dan Negara yang berpengaruh di kawasan tersebut.

